

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Mohammad Hasbi As-Siddiq
NPP. 29.1396

*Asdaf Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: mohammadhasbiassidiq@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Regional financial performance is an important thing to pay attention to to support the APBD and also the implementation of regional programs. However, there are still many problems such as the dependence of the Pinrang Regency area on the central government, in addition to the lack of maximum utilization of regional potential. **Objectives:** the purpose of this study was to find out how the financial performance of the local government on the Regional Revenue and Expenditure Budget during the COVID-19 pandemic, the obstacles experienced in its implementation and the efforts made by the Pinrang Regency government to deal with existing obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that based on Mahmudi's (2016) theory that researchers use in analyzing financial performance it still cannot be said to be good, because many indicators of the existing dimensions are not fulfilled properly, among others caused by less competent human resources. , low regional income, less than optimal regional spending and the occurrence of errors in the SIMDA application. From these obstacles, the government is making efforts to take, including optimizing tax intensification and extensification and increasing the quantity and quality of human resources. **Conclusion:** the conclusion in this study is that financial performance still cannot be said to be good because the performance measurement indicators have not reached the maximum results. while the efforts made are optimizing tax intensification and extensification and increasing the quantity and quality of human resources.

Keywords : *Regional Financial Performance, Financial Ratios, Regional Revenue and Expenditure Budget*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan daerah adalah hal penting untuk diperhatikan untuk menunjang APBD dan juga pelaksanaan program daerah. Namun masih banyak permasalahan seperti ketergantungan daerah Kabupaten Pinrang terhadap pemerintah pusat, selain itu juga kurangnya pemanfaatan potensi daerah secara maksimal. **Tujuan:** tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa pandemi COVID-19, hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya dan

upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menangani hambatan yang ada. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori Mahmudi (2016) yang peneliti pakai dalam menganalisis kinerja keuangan masih belum bisa dikatakan baik, dikarenakan banyak indikator dari dimensi yang ada tidak terpenuhi dengan baik, antara lain disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang berkompetensi, rendahnya pendapatan daerah, kurang optimalnya belanja daerah dan terjadinya kesalahan pada aplikasi SIMDA. Dari hambatan tersebut maka dari itu pemerintah mengusahakan upaya yang diambil diantaranya pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan masih belum bisa dikatakan baik karena indikator pengukuran kinerja belum mencapai hasil yang maksimal. sedangkan upaya yang dilakukan adalah pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia .

Kata kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada pemerintahan Kabupaten Pinrang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang mendapatkan tugas dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur jalannya segala urusan pemerintahan dan kepentingan yang ditujukan untuk melayani masyarakat Kabupaten Pinrang. Selain itu, juga memiliki tugas dimana mereka harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah 2 yang lebih baik dan lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan yang akan di pertanggung jawabkan nantinya kepada pemerintahan pusat termasuk juga kepada masyarakat Kabupaten Pinrang sendiri. Kinerja keuangan daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari efektivitas pemerintah dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam artikel Olivia (2018) menyatakan “secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87%”. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Hal tersebut menjadikan dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti adalah kemandirian keuangan karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan.

Kabupaten Pinrang mengalami beberapa permasalahan keuangan daerah seperti, Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Tantangan akuntabilitas pemerintah daerah diuji secara nasional dan bahkan global di tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID19 yang terjadi sangat cepat dan bersifat global. dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Indonesia, kebijakan yang diatur meliputi kebijakan pendapatan Negara, juga termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan dalam rangka penanganan masalah lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian Indonesia dan/atau stabilitas sistem Keuangan. Kebijakan keuangan yang diambil pemerintah sebagian besar dilimpahkan kepada daerah-daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Menanggapi pandemi COVID-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. APBD merupakan instrumen kebijakan yang fundamental bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi vital dalam upaya pengembangan efektivitas dan kapabilitas pemerintah daerah dan pelaporannya digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan entitas yang terjadi dari tahun ke tahun, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya daerah, terutama pada masa darurat pandemi seperti sekarang ini. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Kinerja keuangan daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari efektivitas pemerintah dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam artikel Olivia (2018) menyatakan “secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87%. Kabupaten Pinrang adalah kabupaten daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari kabupaten Pinrang salah satunya pajak daerah dan potensi daerah yang dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD kabupaten Pinrang, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Pinrang melalui Badan keuangan daerah berupaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Pinrang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Sehingga terjadi kesenjangan dimana otonomi yang sudah lama

dilaksanakan belum juga menunjukkan keberhasilan tujuannya untuk memandirikan setiap daerah otonom.

Pelaksanaan kinerja keuangan yang telah tertera dalam aturan yang sudah dijelaskan pada skripsi menunjukkan bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah agar dapat menggunakannya untuk pembangunan, pelayanan, dan juga pengadaan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Namun dengan adanya Covid – 19 menyebabkan penggunaan anggaran yang harus difokuskan ke sektor – sektor primer demi menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Menanggapi pandemi COVID-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. APBD merupakan instrumen kebijakan yang fundamental bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi vital dalam upaya pengembangan efektivitas dan kapabilitas pemerintah daerah dan pelaporannya digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Disini sangat jelas terlihat kesenjangannya dimana APBD menjadi peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, namun PAD yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang masih kurang dari harapan dan juga masih bergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah pusat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relasi terhadap penelitian yang akan dilakukan dan juga digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dijadikan acuan pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Enre, 2020)** dengan judul Analisis value for money anggaran pendapatan pada pemerintah kota medan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio Value for Money tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio Value for Money selama tahun 2014- 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Rasio ekonomis belum dapat dikatakan ekonomis karena berdasarkan rasio ekonomis yang dihitung selama 5 tahun rata-rata berada diantara 79% yang mana masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif. Penelitian acuan yang kedua adalah penelitian yang telah dilakukan oleh **(Ratnasari, 2015)** yang berjudul Analisis Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money (Studi kasus pemerintah kabupaten pinrang) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 tidak ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi lebih dari 100% yaitu 104.63%. Dari segi efisiensi Kinerja yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 95.89%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas yaitu 108.26% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 sangat efektif. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Muryanti dkk, 2017)** yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten wonogiri tahun anggaran 2011- 2015 dengan metode penelitian adalah Kuantitatif Deskriptif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif. Penelitian yang digunakan sebagai acuan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Onibala dkk, 2021)** dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh **Debi Tamara Enre (2020)** memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya adalah anggaran pendapatan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Debi Tamara Enre terletak pada lokasi penelitian dan konsep yang digunakan dimana penelitiannya menggunakan Konsep Value For Money yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomis, efektivitas dan, efisiensi. Selain itu untuk penelitian yang dilakukan **Ratnasari Haliyah Syamsuddin (2015)** memiliki kesamaan yaitu lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ratnasari Haliyah Syamsuddin terletak pada konsep yang digunakan dimana penelitiannya menggunakan Konsep Value For Money yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomis, efektivitas dan, efisiensi. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Muryati memiliki persamaan yang terletak pada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan laporan realisasi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh **Kiki Muryati (2017)** memiliki perbedaan pada lokasi penelitian dan aspek yang diukur hanya efektivitas dan efisiensi

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa pandemi COVID-19, hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menangani hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara,

observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan asset daerah. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan membahas bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa pandemi COVID-19. Dokumen APBD yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian adalah dokumen tahun 2018- 2020, yang penulis gunakan untuk menganalisa sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pinrang. Tahap pembahasan ini dianalisis melalui dua perspektif, yaitu pertama perspektif teoritis berdasarkan teori dari ahli dan yang kedua adalah perspektif legalistik berdasarkan regulasi atau peraturan yang mendasarinya.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Pada analisis ini, penulis menggunakan Penilaian Kinerja keuangan daerah salah satunya dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis rasio keuangan daerah yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori Mahmudi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yaitu: a) **Rasio kemandirian** adalah rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Hasil dari perhitungan rasio mendapatkan nilai persentase sebesar 13,7% yang berarti Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer dalam hal ini dana alokasi yang umum yang menjadi dominan dari pihak eksternal. Sehingga untuk memenuhi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang memang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer yang tinggi karena pendapatan asli daerah belum dapat menutupi kekurangan yang akan ditimbulkan apabila pendapatan transfer berkurang seperti pada saat pandemi sekarang ini. b) **Rasio Efektifitas** adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil persentase rasio efektifitas Kabupaten Pinrang menunjukkan nilai 103,4% yang berarti Kabupaten Pinrang sangat efektif dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Artinya kinerja keuangan Kabupaten Pinrang apabila ditinjau berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sudah sangat baik karena terbukti dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan berjalan sudah sesuai atau bahkan melebihi dengan yang diharapkan, berarti pemerintah Kabupaten Pinrang telah mampu mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah. c) **Rasio Efisiensi** adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dalam hal ini belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Hasil perhitungan rasio menunjukkan nilai 91,2% yang berarti Pemerintah Kabupaten Pinrang kurang efisien dalam mengelola pengeluaran daerah yaitu belanja daerah. Cukup tingginya

pembelanjaan daerah yang meningkat secara berbeda dari tahun ke tahun daripada pendapatan daerah yang dihasilkan maka rasio yang dihasilkan juga akan cukup besar sehingga pemerintah Kabupaten Pinrang belum efisien untuk dapat membiayai seluruh program kegiatan pemerintah Kabupaten Pinrang. d) **Rasio Keserasian** adalah rasio yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana belanja daerah secara maksimal. Hasil rasio ini menunjukkan bahwa presentase rasio belanja operasi di Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan baik dan kurang dalam mengutamakan penyediaan sarana prasarana pembangunan ekonomi daerahnya, namun sudah ada tanda peningkatan perhatian kearah sarana dan prasarana. e) **Rasio Pertumbuhan** adalah rasio yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dari periode realisasi Penerimaan satu ke periode berikutnya. Hasil perhitungan rasio menunjukkan pengelolaan PAD, belanja daerah dan juga ketergantungan masih menunjukkan nilai rata-rata nilai yang belum maksimal.

3.2. Faktor – Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi riil dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah otonom atau hampir seluruh daerah di Indonesia belum mampu dikatakan mandiri atau belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait mengenai gambaran faktor yang menjadi penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yang dijelaskan sebagai berikut:

a) SDM yang kurang berkompeten karena setiap saat ada pergantian personil juga menjadi salah satu penghambat pengelola keuangan. Sering kali dilapangan terbentur dengan pergantian personil yang baru namun belum dibekali dengan cara-cara mengelola keuangan apalagi yang bekerja juga menggunakan aplikasi. Apabila salah satu SKPD terkendala atau tidak tuntas dalam menyusun laporan keuangan maka akan menghambat laporan keuangan kita secara keseluruhan. b) Kesalahan dalam aplikasi SIMDA karena permasalahan update aplikasi tersebut. Hal ini terjadi karena setiap update aplikasi akan terjadi salah pemasukkan input data yang berkaitan tentang keuangan. Sehingga dapat menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi terhambat.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kinerja keuangan pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan Pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dalam hal ini pegawai yang mau ataupun yang sudah memiliki dasar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ataupun sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan. Terkhususnya pada bidang pengelolaan sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu meneliti tentang kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Pinrang belum bisa dikatakan baik karena masih ada indikator yang belum memenuhi kategori bagus. Rasio itu adalah rasio Kemandirian pemerintah yang menunjukkan bahwa karena belum mampu melaksanakan otonomi daerah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat dan rasio efisiensi dinyatakan masih kurang mampu dalam meminimalisir belanja daerah dalam rangka merealisasikan pendapatan daerah. Hasil dari perhitungan rasio mendapatkan nilai persentase sebesar 13,7% yang berarti Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer dalam hal ini dana alokasi yang umum yang menjadi dominan dari pihak eksternal. Temuan ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Enre, 2020) yang menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio Value for Money tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio Value for Money selama tahun 2014- 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Hasil persentase rasio efektifitas Kabupaten Pinrang menunjukkan nilai 103,4% yang berarti Kabupaten Pinrang sangat efektif dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Artinya kinerja keuangan Kabupaten Pinrang apabila ditinjau berdasarkan rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sudah sangat baik karena terbukti dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan berjalan sudah sesuai atau bahkan melebihi dengan yang diharapkan, berarti pemerintah Kabupaten Pinrang telah mampu mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2015) menunjukkan tingkat efektifitas yang sama dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio efektifitas yaitu 108.26% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 sangat efektif.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis kinerja keuangan masih belum dapat dikatakan baik, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dengan baik karena adanya faktor penghambat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja keuangan daerah Kabupaten Pinrang pada masa pandemi COVID-19 yaitu banyaknya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKPD Kabupaten Pinrang yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk mempekerjakan tenaga kontrak yang lebih berkompeten pada bidangnya dan ketidakstabilan kinerja organisasi karena sering terjadi keterlambatan dalam penyeteroran laporan dari SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang.

Upaya yang dilakukan dalam menangani penghambat tersebut adalah Pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dan Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dalam hal ini pegawai yang mau ataupun yang sudah memiliki dasar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pinrang kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan penggalian informasi guna menyukkseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.indah Nurfadillah. 2016. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Enre, Debby Tamara. 2020. *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 3)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Muryanti, Kiky dan Sugiyanto, Eko. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Onibala, dkk. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.22 No.2
- Olivia, Grace. 2018. *Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbdpada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi>. Diakses pada 20 September 2021
- Ratnasari. 2015. *Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan value for money*, Skripsi. Universitas Hasanuddin.